

MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN (MPK)



PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

DEMOKRASI

HUSNUL FATIHAH, M.Pd

PUSPA DIANTI, M.Pd.

DAFTAR ISI

DEMOKRASI.....	3
A. Konsep dan Urgensi Demokrasi	3
B. Sumber Historis, Sosiologis, Politik Demokrasi	7
C. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila	7
SOAL LATIHAN	23
DAFTAR PUSTAKA	25

DEMOKRASI INDONESIA

A. Memahami Konsep dan Urgensi Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

1. Hakikat Demokrasi

Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Silahkan Anda deskripsikan yang ada dipikiran Anda ketika mendengar kata demokrasi. Seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita mendengar ungkapan mengenai demokrasi. Dalam (Bintoro, 2006) istilah demokrasi secara sederhana sering muncul dalam ungkapan, cerita atau mitos. Misalnya, orang Minangkabau membanggakan tradisi demokrasi mereka, yang dinyatakan dalam ungkapan: “Bulat air di pembuluh, bulat kata di mufakat”. Orang Jawa, secara samar-samar menunjukkan tentang gagasan demokrasi dengan mengacu kebiasaan rakyat Jawa untuk pepe (berjemur) di muka keraton bila mereka ingin mengungkapkan persoalan hidupnya kepada Raja. Ada juga yang mencoba menjelaskan dari cerita wayang, bahwa Bima atau Werkudara memakai mahkota yang dinamai Gelung Mangkara Unggul, artinya sanggul (dandanan rambut) yang tinggi di belakang. Hal ini diberi makna rakyat yang di belakang itu sebenarnya unggul atau tinggi, artinya: berkuasa

Berdasarkan beberapa pengantar di atas, sesungguhnya secara etimologis, demokrasi berasal dari Bahasa Yunani Kuno, yang terdiri atas dua kata, yaitu “demos” dan “kratein”. Kata demos memiliki arti rakyat dan cratos memiliki makna pemerintahan. Jika kita hubungkan, maka dapat dipahami bahwa secara etimologi atau bahasa demokrasi adalah pemerintahan rakyat.

Selain dari segi bahasa, pengertian demokrasi juga dikemukakan oleh banyak ahli. Dalam “The Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Hornby, 1995) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan *democracy* adalah “(1) country with principles of government in which all adult citizens share through their elected representatives; (2) country with government which encourages and allows rights of citizenship such as freedom of speech, religion, opinion, and association, the assertion of rule of law, majority rule, accompanied by respect for the rights of minorities. (3) society in which there is treatment of each other by citizens as equals”.

Dari kutipan pengertian tersebut tampak bahwa kata demokrasi merujuk pada pengertian kehidupan bernegara atau bermasyarakat di mana warganegara dewasa diharapkan dapat berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. selanjutnya pemerintahan yang dalam hal ini merupakan wakil rakyat dapat memberikan jaminan kebebasan/ kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan "rule of law", adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas; dan masyarakat yang warganegaranya saling memberi perlakuan yang sama. Makna demokrasi di atas sesungguhnya senada dengan yang disampaikan oleh Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa "demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" atau "the government from the people, by the people, and for the people". Dalam hal ini "people" yang menjadi pusatnya.

Selanjutnya, demokrasi oleh Pabottinggi (2002) disikapi sebagai pemerintahan yang memiliki paradigma "otocentricity" atau otosentrisitas yakni rakyatlah (people) yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi. Sebagai suatu konsep demokrasi diterima sebagai "...seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, yang juga mencakup seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan" (USIS,1995).

Selanjutnya, sebagai suatu sistem sosial kenegaraan, USIS (1995) menyimpulkan bahwa demokrasi sebagai sistem memiliki sebelas pilar atau soko guru, yakni "Kedaulatan Rakyat, Pemerintahan Berdasarkan Persetujuan dari yang Diperintah, Kekuasaan Mayoritas, Hak-hak Minoritas, Jaminan Hak-hak Azasi Manusia, Pemilihan yang Bebas dan Jujur, Persamaan di depan Hukum, Proses Hukum yang Wajar, Pembatasan Pemerintahan secara Konstitusional, Pluralisme Sosial, Ekonomi dan Politik, dan Nilai-nilai Toleransi, Pragmatisme, Kerja Sama dan Mufakat."

Dalam hal lainnya, , Sanusi (2006) mencoba untuk mencoba mengidentifikasi sepuluh pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945, yakni :

1. Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,

2. Demokrasi Dengan Kecerdasan,
3. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat,
4. Demokrasi dengan “Rule of Law”,
5. Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara,
6. Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia,
7. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka,
8. Demokrasi dengan Otonomi Daerah,
9. Demokrasi Dengan Kemakmuran,
10. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial.”

Bila kita amati, sesungguhnya secara esensial terdapat persamaan antara sebelas pilar demokrasi universal ala USIS (1995) dengan 9 dari 10 pilar demokrasi Indonesia ala Sanusi (2006). Namun, ada satu hal yang membedakan pilar demokrasi universal dengan pilar demokrasi Indonesia, yaitu adanya pilar demokrasi Indonesia yang menyebutkan bahwa Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan inilah justru yang menjadi ciri khas dan dasar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pilar demokrasi Indonesia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa merupakan kunci yang mendasari pilar-pilar lainnya sebagaimana diambil dalam dasar negara Indonesia sila pertama. Sebagaimana telah kita pahami bersama bahwa sila pertama Dasar Negara Indonesia yaitu Ketuhanan yang Maha Esa melingkupi sila-sila lain di bawahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaannya dengan pilar demokrasi universal lainnya tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

Selanjutnya, perbedaan medasar demokrasi Indonesia dengan demokrasi universal juga dikemukakan oleh Maududi dan kaum muslim (Esposito dan Voll,1996) disebut “teodemokrasi”, yakni demokrasi dalam konteks kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain demokrasi universal adalah demokrasi yang bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang ber- Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Tiga Tradisi Pemikiran Politik Demokrasi

Secara konseptual, Carlos Alberto Torres (1998) mencoba mengemukakan pengertian demokrasi yang dapat dilihat dari tiga tradisi pemikiran politik, yakni

“classical Aristotelian theory, medieval theory, contemporary doctrine”. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni

“...the government of all citizens who enjoy the benefits of citizenship”, atau pemerintahan oleh seluruh warganegara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu dalam tradisi “medieval theory” yang pada dasarnya menerapkan “Roman law” dan konsep “popular sovereignty” menempatkan “...a foundation for the exercise of power, leaving the supreme power in the hands of the people”, atau suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam “contemporary doctrine of democracy”, konsep “republican” dipandang sebagai “...the most genuinely popular form of government”, atau konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni.

Selanjutnya,, Torres (1998) juga memberikan pandangan mengenai demokrasi dari dua aspek, yakni “formal democracy” “substantive democracy” dan “Formal democracy” yang kedua aspek tersebut menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari dalam berbagai pelaksanaan demokrasi di berbagai negara. Dalam suatu negara demokrasi, suatu negara dapat melaksanakan pemerintahannya dengan menggunakan system parlementer ataupun presindensial. Seperti kita ambil contoh Negara Indonesia yang dalam pelaksanaan pemerintahannya menerapkan system pemerintahan presidensial.

3. Pentingnya Demokrasi sebagai Sistem Politik Kenegaraan Modern

Sebelum kita berbicara mengenai pentingnya pelaksanaan demokrasi sebagai suatu system politik kenegaraan modern maka muncul pertanyaan Mengapa demokrasi yang dipilih sebagai jalan bagi bentuk pemerintahan guna mencapai tujuan bernegara yakni kesejahteraan? Awalnya, demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, dimulai dari sejarah Yunani Kuno. Namun pengertian demokrasi saat itu belumlah seideal seperti saat ini. Demokrasi saat itu masih sebatas pemberian pemberian kebebasan berpartisipasi politik pada

minoritas kaum laki-laki dewasa yang hal tersebut sangat jauh dari pengertian demokrasi yang ideal.

Selanjutnya, Demokrasi di mata para pemikir Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles justru memberikan penilaian yang berbeda . mereka mengemukakan bahwa demokrasi bukanlah bentuk pemerintahan yang ideal. Mereka menilai demokrasi sebagai pemerintahan oleh orang miskin atau pemerintahan oleh orang dungu. Demokrasi Yunani Kuno itu selanjutnya tenggelam oleh kemunculan pemerintahan model Kekaisaran Romawi dan tumbuhnya negara-negara kerajaan di Eropa sampai abad ke-17.

Namun demikian, pada akhir abad ke-17 lahirlah demokrasi “ modern” yang disemai oleh para pemikir Barat seperti Thomas Hobbes, Montesqueau, dan J. J. Rousseau, bersamaan dengan munculnya konsep negara-bangsa di Eropa. Demokrasi mengalami perkembangan yang makin pesat dan makin diterima di banyak negara terlebih sesudah Perang Dunia II. Suatu penelitian dari Unesco tahun 1949 menyatakan “ mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukungnya yang berpengaruh” (Budiardjo, 2008)

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah dibahas di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun banyak perbedaan mengenai mengenai pemikiran demokrasi, namun sampai saat ini, sistem demokrasi khususnya dalam pelaksanaan system pemerintahan tetap diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Hampir semua negara modern medeklarasikan dirinya telah melaksanakan sistem demokrasi dalam pemerintahannya dan sebaliknya akan menghindar dari julukan sebagai negara yang “undemocracy”

4. Mengapa kehidupan demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat?

Membahas mengenai demokrasi sangat penting dikembangkan dalam kehidupan masyarakat maka jawabannya adalah demokrasilah yang memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara...dapat dibayangkan kehidupan masyarakat anpa adanya demokrasi di suatu negara, dan segala sesuatunya di atur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Demokrasi sangatlah penting dan di perlukan masyarakat, tidak hanya sekedar pemerintah yang memegang kendali dalam pengaturan suatu negara, perlu adanya masyarakat yang komplemen, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Hal tersebut tentu sesuai dengan pengertian demokrasi secara etimologis, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan kehidupan berdemokrasi tidak ada keinginan untuk menang sendiri, saling memaksakan kehendak, menghina, melecehkan, menjatuhkan. Justru yang diperjuangkan adalah nada saling menghargai, menghormati, mengerti, menerima pendapat orang lain, lapang dada, tenggang rasa. Dengan demikian diharapkan mampu mewujudkan kehidupan yang nyaman dan tentram.

Untuk dapat lebih memahami betapa pentingnya menerapkan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat kita dapat melihat berbagai contoh kasus yang ada di media massa baik cetak maupun elektronik. Banyak permasalahan dalam masyarakat yang muncul disebabkan oleh kurangnya penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang hanya mencoba memperjuangkan aspirasi individu atau kelompoknya sendiri dan mengabaikan aspirasi dari kelompok lain.

B. Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Demokrasi yang Bersumber dari Pancasila

Terdapat tiga sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu Bangsa Indonesia. Pertama, tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan Ilahi dalam

masyarakat serta persaudaraan antarmanusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, paham sosialis Barat, yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya. Berdasarkan ketiga tersebut dapat dipahami bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia tetap mempertahankan jati diri Bangsa Indonesia yang bersumber dari dasar negara Pancasila, yaitu sila Ketuhanan yang Maha Esa, selanjutnya sila keempat yaitu nilai permusyawaratan dan yang ketiga adalah mengadopsi nilai-nilai yang bersumber pada paham sosialis barat.

1. Sumber Nilai yang Berasal dari Demokrasi Desa

Istilah demokrasi yang rumuskan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia ketika merdeka. Kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Akan tetapi, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara, dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil, seperti desa di Jawa, nagari di Sumatra Barat, dan banjar di Bali (Latif, 2011). Mengenai adanya anasir demokrasi dalam tradisi desa kita akan meminjam dua macam analisis berikut.

Pertama, paham kedaulatan rakyat sesungguhnya merupakan paham yang bersumber dari sila keempat Dasar Negara Indonesia. Meskipun paham tersebut bersumber dari sila keempat Pancasila namun, telah nampak dalam kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Seperti sejarah yang telah kita ketahui bersama bahwasanya nilai-nilai yang terkandung dalam Dasar Negara Indonesia, yaitu Pancasila merupakan jati diri yang menggambarkan kehidupan masyarakat Indonesia jauh sebelum kemerdekaan diraih. Di alam Minangkabau, misalnya pada abad XIV sampai XV kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Ada istilah yang cukup terkenal pada masa itu bahwa *Rakyat ber-raja pada Penghulu, Penghulu ber- raja pada Mufakat, dan Mufakat ber-raja pada alur dan patut*. Dengan demikian, raja sejati di dalam kultur Minangkabau ada pada alur (logika) dan patut (keadilan). Alur dan patutlah yang menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seorang raja akan ditolak

apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan (Malaka, 2005).

Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Hal inilah yang mendorong tradisi gotong royong dalam memanfaatkan tanah bersama, yang selanjutnya merembet pada bidang-bidang lainnya, termasuk pada hal-hal kepentingan pribadi seperti misalnya membangun rumah, kenduri, dan sebagainya. Adat hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat (kata sepakat). Seperti disebut dalam pepatah Minangkabau: “Bulek aei dek pambuluah, bulek kato dek mufakat” (Bulat air karena pembuluh/bambu, bulat kata karena mufakat). Tradisi musyawarah mufakat ini kemudian melahirkan institusi rapat pada tempat tertentu, di bawah pimpinan kepala desa. Setiap orang dewasa yang menjadi warga asli desa tersebut berhak hadir dalam rapat itu. Karena alasan pemilikan faktor produksi bersama dan tradisi musyawarah, tradisi desa boleh saja ditindas oleh kekuasaan feodal, namun sama sekali tidak dapat dilenyapkan, bahkan tumbuh subur sebagai adat istiadat. Hal ini menanamkan keyakinan pada kaum pergerakan bahwa demokrasi asli Nusantara itu kuat bertahan, “liat hidupnya”, seperti terkandung dalam pepatah Minangkabau “indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan”, tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan (Hatta, 1992).

terdapat dua anasir lagi yang berasal dari tradisi demokrasi desa yang asli nusantara, yaitu hak dalam memberikan keberatan bersama terhadap berbagai peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak rakyat untuk meninggalkan daerah kekuasaan raja jika sang rakyat tidak lagi berkenan untuk tinggal di daerah kekuasaan raja. Dalam melakukan protes, biasanya rakyat secara bergerombol berkumpul di alun-alun dan duduk di situ beberapa lama tanpa berbuat apa-apa, yang mengekspresikan suatu bentuk demonstrasi damai. Tidak sering rakyat yang sabar melakukan itu. Namun, apabila hal itu

dilakukan, pertanda menggambarkan situasi kegentingan yang memaksa penguasa untuk mempertimbangkan ulang peraturan yang dikeluarkannya. Adapun hak menyingkir, dapat dianggap sebagai hak seseorang untuk menentukan nasib sendiri. Kesemua itu menjadi bahan dasar yang dipertimbangkan oleh para pendiri bangsa untuk mencoba membuat konsepsi demokrasi Indonesia yang modern, berdasarkan demokrasi desa yang asli itu (Latif, 2011).

Selanjutnya Hatta menjelaskan bahwa kelima anasir demokrasi asli, yaitu: rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama dan hak menyingkir dari daerah kekuasaan raja, dianggap sebagai sesuatu yang baik dalam lingkungan pergerakan nasional dan dijadikan sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial dan dasar pemerintahan Indonesia merdeka di masa mendatang (Hatta, 1992).

2. Sumber Nilai yang Berasal dari Islam

Salah satu sumber yang dijadikan pilar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang berlandaskan kepada Ketuhanan yang Maha Esa bukanlah demokrasi yang sekuler. Salah satu sumber nilai ketuhanan yang terbesar adalah nilai-nilai Islam karena tidak dapat dipungkiri bahwa perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia banyak dipengaruhi oleh tokoh Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada Ketuhanan Yang Maha Esa (Tauhid, Monoteisme). Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan, bersifat fatamorgana belaka. Konsekuensinya, semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak, dinilai bertentangan dengan jiwa Tauhid (Latif, 2011). Dengan demikian dapat dipahami bahwa membuat peraturan hidup dengan secara mutlak memberikan kekuasaan penuh kepada para penguasa dalam hal ini pemerintahan merupakan suatu ketidakadilan dan bertentangan nilai agama terutama Islam. Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Madjid, 1992). Sikap pasrah kepada Tuhan, yang memutlakkan Tuhan dan tidak pada sesuatu yang lain, menghendaki tatanan sosial terbuka, adil, dan demokratis

Kelanjutan logis dari prinsip Tauhid adalah paham persamaan (kesederajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antarsesama manusia. Bahkan seorang utusan Tuhan tidak berhak melakukan pemaksaan itu. Seorang utusan Tuhan mendapat tugas hanya untuk menyampaikan kebenaran (tabligh) kepada umat manusia, bukan untuk memaksakan kebenaran kepada mereka. Dengan prinsip persamaan manusia di hadapan Tuhan itu, tiap-tiap manusia dimuliakan kehidupan, kehormatan, hak-hak, dan kebebasannya yang dengan kebebasan pribadinya itu manusia menjadi makhluk moral yang harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya. Dengan prinsip persamaan, manusia juga didorong menjadi makhluk sosial yang menjalin kerjasama dan persaudaraan untuk mengatasi kesenjangan dan meningkatkan mutu kehidupan bersama (Latif, 2011).

Sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip-prinsip Tauhid itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad S.A.W. sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah, dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa (nation). Negara-kota Madinah yang dibangun Nabi adalah sebuah entitas politik berdasarkan konsepsi Negara-bangsa "*nation-state*", yaitu Negara untuk seluruh umat atau warganegara, demi maslahat bersama "*common good*". Sebagaimana termaktub dalam Piagam Madinah, "negara-bangsa" didirikan atas dasar penyatuan seluruh kekuatan masyarakat menjadi bangsa yang satu (ummatan wahidah) tanpa membedakan kelompok keagamaan yang ada. Robert N. Bellah menyebutkan bahwa contoh awal nasionalisme modern mewujud dalam sistem masyarakat Madinah masa Nabi dan para khalifah. Robert N. Bellah mengatakan bahwa sistem yang dibangun Nabi itu adalah "*a better model for modern national community building than might be imagined*" (suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih baik dari yang dapat dibayangkan). Komunitas ini disebut modern karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat dan karena adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan. Lebih jauh, Bellah juga menyebut sistem Madinah sebagai bentuk nasionalisme yang egaliter partisipatif (*egalitarian participant nationalism*). Hal ini berbeda dengan sistem republik

negara-kota Yunani Kuno, yang membuka partisipasi hanya kepada kaum lelaki merdeka, yang hanya meliputi lima persen dari penduduk (Latif, 2011).

Pengaruh ajaran Islam mampu membawa pergeseran nusantara dari sistem kemasyarakatan *feodalistis* berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih *egaliter*. Pergeseran ini terlihat dari perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap para penguasanya.. Sebelum kedatangan Islam, dalam dunia Melayu berkembang peribahasa, “*Melayu pantang membantah*”. Melalui pengaruh Islam, peribahasa itu berubah menjadi “*Raja adil, raja disembah; raja zalim, raja disanggah*”. Selanjutnya, Nilai-nilai egalitarianisme Islam ini pula yang memaksa kaum pribumi untuk menolak sistem kasta yang dibawa oleh kelompok kolonial (Wertheim, 1956). Senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Soekarno (1965), pengaruh Islam di Nusantara membawa pergeseran masyarakat feodal menuju masyarakat yang lebih demokratis. Dalam perkembangannya, Hatta juga memandang stimulus Islam sebagai salah satu sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi sosial di kalbu para pemimpin pergerakan kebangsaan.

3. Sumber Nilai yang Berasal dari Barat

Masyarakat Barat (Eropa) mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara-kota sekitar abad ke-5 SM. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma (Italia), yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya, seperti Florence dan Venice. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 M, bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 M kemudian lenyap pada akhir “zaman pertengahan” Eropa. Setidaknya sejak pertengahan 1300 M, karena kemunduran ekonomi, korupsi dan peperangan, pemerintahan demokratis di Eropa digantikan oleh sistem pemerintahan otoriter (Dahl, 1992).

Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance (sekitar abad ke-14 – 17 M), setelah memperoleh

stimulus baru, antara lain, dari peradaban Islam. Tonggak penting dari era Renaissance yang mendorong kebangkitan kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan Reformasi Protestan sejak 1517 hingga tercapainya kesepakatan Westphalia pada 1648, yang meletakkan prinsip co-existence dalam hubungan agama dan Negara—yang membuka jalan bagi kebangkitan Negara-bangsa (nation-state) dan tatanan kehidupan politik yang lebih demokratis.

Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda, di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat: sisi represi imperialisme-kapitalisme dan sisi humanisme-demokratis. Penindasan politik dan penghisapan ekonomi oleh imperialisme dan kapitalisme, yang tidak jarang bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan feodal bumi putera, menumbuhkan sikap anti-penindasan, anti-penjajahan, dan anti-feodalisme di kalangan para perintis kemerdekaan bangsa. Dalam melakukan perlawanan terhadap represi politik-ekonomi kolonial itu, mereka juga mendapatkan stimulus dari gagasan-gagasan humanisme-demokratis Eropa (Latif, 2011).

Penyebaran nilai-nilai humanisme-demokratis itu menemukan ruang aktualisasinya dalam kemunculan ruang publik modern di Indonesia sejak akhir abad ke-19. Ruang publik ini berkembang di sekitar institusi-institusi pendidikan modern, kapitalisme percetakan, klub-klub sosial bergaya Eropa, kemunculan berbagai gerakan sosial (seperti Boedi Oetomo, Syarekat Islam dan lain-lain) yang berujung pada pendirian partai-partai politik (sejak 1920-an), dan kehadiran Dewan Rakyat (Volksraad) sejak 1918.

Sumber inspirasi dari anasir demokrasi desa, ajaran Islam, dan sosio-demokrasi Barat, memberikan landasan persatuan dari keragaman., Segala keragaman ideologi-politik yang dikembangkan, yang bercorak keagamaan maupun sekuler, semuanya memiliki titik-temu dalam gagasan-gagasan demokrasi sosialistik (kekeluargaan), dan secara umum menolak individualisme. Selanjutnya perlu dipertanyakan bagaimana praktik demokrasi di Indonesia sejak dulu sampai sekarang? Apa Indonesia telah menerapkan demokrasi Pancasila? Dalam kurun sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang ini, ternyata pelaksanaan demokrasi mengalami dinamikanya. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Beberapa ahli memberikan pandangannya. Misalnya,

Budiardjo (2008) menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam empat masa, yaitu :

1. Masa Republik Indonesia I (1945-1959) yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan Demokrasi Parlementer,
2. Masa Republik Indonesia II (1959-1965) yaitu masa Demokrasi Terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat.
3. Masa Republik Indonesia III (1965-1998) yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil.
4. Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang) yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III.

Mengacu pada penjelasan yang telah Anda baca di atas, coba Anda temukan satu pendapat tentang dinamika demokrasi di Indonesia. Anda analisis adakah perbedaan dengan pendapat Miriam Budiardjo di atas? Menurut analisis Anda, benarkah saat ini dikatakan kita mengalami demokrasi reformasi? Kemukakan pendapat Anda secara lisan. Lakukan secara diskusi kelompok.

C. Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Demokrasi Pancasila

1. Kehidupan Demokratis yang Bagaimana yang Kita Kembangkan?

Demokrasi itu selain memiliki sifat yang universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa-bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Sifat khas demokrasi di setiap negara biasanya tergantung ideologi masing-masing. Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan idiil Pancasila dan landasan konstitusional UUD NRI Tahun 1945. Berikut ini diketengahkan

“Sepuluh Pilar Demokrasi Pancasila” yang dipesankan oleh para pembentuk Negara RI, sebagaimana diletakkan di dalam UUD NRI Tahun 1945 (Sanusi, 2006).

No.	PILAR DEMOKRASI PANCASILA	MAKSUD ESENSINYA
1	Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.	Segala hal mengenai sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan yang Maha Esa.
2	Demokrasi dengan Kecerdasan	Dalam pelaksanaan demokrasi menurut UUD 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional.
3	Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat.	Kunci pelaksanaan demokrasi adalah meletakkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR (DPR/DPD) dan DPRD.
4	Demokrasi dengan Rule of Law.	a. Pelaksanaan kekuasaan negara RI yang dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah itu harus mengandung,

		<p>melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif.</p> <p>b. Kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura.</p> <p>c. Kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (legal security) bukan demokrasi yang membiarkan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan</p>
5	Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan	<p>Pelaksanaan demokrasi berdasarkan UUD 1945 tidak hanya mengakui kekuasaan negara RI yang tidak tak terbatas secara hukum, tetapi juga pelaksanaan demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Jadi, demokrasi menurut UUD 1945 mengenal semacam division and separation of power, dengan sistem check and balance.</p>
6	Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia.	<p>Pelaksanaan demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi tersebut, melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.</p>
7	Demokrasi dengan Pengadilan yang	<p>Pelaksanaan demokrasi menurut UUD</p>

	Merdeka.	1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka (independen) yang memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Di muka pengadilan yang merdeka, penggugat dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama untuk mengajukan konsiderans, dalil-dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan petitumnya.
8	Demokrasi dengan Otonomi Daerah	Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan Presiden. UUD 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom besar dan kecil, yang ditafsirkan daerah otonom I dan II. Dengan Peraturan Pemerintah daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan- urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepadanya.
9	Demokrasi dengan Kemakmuran	Demokrasi tu bukan hanya soal kebebasan dan hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab, bukan

		pula hanya soal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu semua, jika dipertanyakan “where is the beef?”, demokrasi menurut UUD 1945 itu ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran (Welvaarts Staat) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia.
10	Demokrasi yang Berkeadilan Sosial	Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi yang menjadi anak emas, yang diberi berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus.

Kehidupan demokrasi Paancasila Indonesia jika dilihat dari maksud esesnsinya merupakan sesuatu yang sangat ideal jika dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun di lapangan yang terjadi Das Solen dan Das Sein nya berbeda. Dalam kenyataan sering kali terjadi kesenjangan dan bahkan penyimpangan yang cukup jauh. Hal ini tentu merupakan hal yang wajar terjadi mengingat Indonesia adalah negara yang beragam, negara multikultur yang perlu strategi khusus untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan akibat perbedaan tersebut.

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih lanjut berkaitan dengan analisis implementasi dari kesepuluh pilar demokrasi itu dalam berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan serta ihwal

tingkat keberhasilannya. Adakah kesenjangan antara yang normatif dengan praktiknya? Hasil analisis tersebut tentunya dapat dijadikan sebagai bahan berpikir awal untuk mencari solusinya.

2. Mengapa Kehidupan yang Demokratis Itu Penting ?

Untuk menjawab pertanyaan mengapa kehidupan yang demokratis itu penting maka perlu dilakukan kajian mendalam akan hal tersebut. Pada dasarnya, kehidupan demokratis itu penting karena melalui penerapan kehidupan yang demokratis mampu menciptakan masyarakat suatu negara yang merasakan keadilan dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, sebuah negara baru bisa disebut sebagai negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai kesempatan untuk terlibat dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Mari kita uraikan makna masing-masing.

a. Partisipasi dalam Pembuatan Keputusan

Pelaksanaan demokrasi dalam suatu pemerintahan negara menempatkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan pemerintahan dijalankan sesuai aspirasi rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus menjadi pertimbangan dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Sebagaimana telah diamanatkan ketika seseorang diutus untuk menjadi wakil rakyat maka para pembuat kebijakan haruslah memperhatikan seluruh aspirasi rakyat yang berkembang. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Sebagai contoh ketika masyarakat kota tertentu resah dengan semakin tercemarnya udara oleh asap rokok yang berasal dari para perokok, maka pemerintah kota mengeluarkan peraturan daerah tentang larangan merokok di tempat umum.

b. Persamaan Kedudukan di Depan Hukum

Seiring dengan adanya tuntutan agar pemerintah harus berjalan baik dan dapat mengayomi rakyat dibutuhkan adanya hukum yang menjadi pembatas atas kesewewenangan yang dikhawatirkan akan dilakukan oleh pemerintah. Melalui hukum tersebut rakyat dapat melakukan pembatasan dan mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Hukum tidak boleh pandang bulu. Siapa saja yang bersalah dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk menciptakan hal itu harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. meskipun yang menjadi kelemahannya adalah produk hukum itu sendiri bersumber besar dari pemerintah. Idealnya keadilan akan tercipta ketika produk hukum yang dibuat baik dan aparat penegak hukumnya juga baik.

c. Distribusi Pendapatan Secara Adil

Dalam pelaksanaan kehidupan negara demokrasi, semua bidang harus dijalankan secara seimbang atau tidak berat sebelah, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir dan miskin yang berpendapatan rendah. Akhir-akhir ini Pemerintah menjalankan program pemberian bantuan tunai langsung, hal tersebut dilakukan dalam upaya membantu langsung para fakir miskin. Pada kesempatan lain, Pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat bisa memperoleh penghasilan. Dengan program-program tersebut diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara warga negara Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, karena seandainya kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan rakyat tidak berjalan, tidak ada jaminan hak-hak asasi manusia, tidak ada persamaan di depan hukum. Jika demikian, tampaknya kita akan semakin jauh dari tujuan

mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Setujukah Anda dengan pernyataan ini ?

3. Bagaimana Penerapan Demokrasi dalam Pemilihan Pemimpin Politik dan Pejabat Negara ?

Seorang wanita tua menghadap Sultan Sulaiman al-Qanuni untuk mengadu bahwa tentara sultan mencuri ternak dombanya ketika dia sedang tidur. Setelah mendengar pengaduan itu, Sultan Sulaiman berkata kepada Wanita itu, “Seharusnya kamu menjaga ternakmu dan jangan tidur”. Mendengar perkataan tersebut wanita tua itu menjawab, “Saya mengira baginda menjaga dan melindungi kami sehingga aku tidur dengan aman” (Hikmah Dalam Humor, Kisah, dan Pepatah, 1998).

Kisah di atas menunjukkan contoh pemimpin yang lemah, yakni pemimpin yang tidak mampu melindungi rakyatnya. Seorang pemimpin memang harus yang memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat- syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut seorang pemimpin itu harus beriman dan bertawa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis.

Berikut merupakan kisah yang menginspirasi yang dapat menggambarkan bagaimana karakter seorang pemimpin.

a. Beriman dan bertaqwa

Dalam suatu kisah, ada seorang Khalifah sedang melakukan perjalanan mengamati kehidupan rakyatnya ke pelosok-pelosok kampung. Di perjalanan beliau bertemu dengan seorang anak penggembala kambing yang sedang menggembalakan kambing- kambingnya di padang rumput yang hijau. Khalifah mendekati anak itu seraya berkata, “*Nak, bolehkah Bapak membeli seekor kambing gembalaanmu*”, ujar Khalifah. Anak itu lalu menjawab, “*tidak bisa Pak, kambing ini bukan milik saya, kambing- kambing ini milik majikan saya*”, ujar anak itu. Sang Khalifah tambah penasaran, lalu beliau menegaskan akan hasratnya untuk membeli seekor kambing gembalaan anak tersebut.

“Nak, kambing gembalaanmu amat banyak, maka jika hanya seekor saja kamu jual, majikanmu tidak mungkin mengetahuinya. Kalaupun nantinya majikanmu tahu juga ada seekor kambing miliknya yang hilang, maka katakan saja diterkam serigala”, ujar Khalifah meyakinkan anak itu. Tanpa diduga sedikit pun oleh Khalifah, anak itu lantas menjawab, “Pak, sekalipun majikan saya tidak akan mengetahui seekor kambing miliknya telah saya jual, apakah Allah juga tidak akan mengetahui perbuatan saya itu?”, jawab anak itu sambil menatap wajah Khalifah dengan sorot mata yang amat tajam.

Tidak kuasa menahan rasa haru, Sang Khalifah membalikkan badannya membelakangi anak tersebut sambil mengusap wajahnya yang dibasahi air mata keharuan. Khalifah amat kagum, seorang anak penggembala, yang oleh kebanyakan orang dianggap hina, ternyata menunjukkan keimanan yang amat kukuh. Lalu Sang Khalifah membalikkan badannya dan merangkul anak itu yang masih terkaget-kaget menyaksikan kejadian tersebut. Baru setelah Khalifah itu memperkenalkan dirinya, anak gembala itu pun menyadarinya bahwa yang mendekap dirinya itu adalah Sang Penguasa Negerinya, yakni Khalifah Umar Bin Khatab.

Berdasar cerita di atas, bagaimana sebaiknya sikap seseorang yang memperoleh kepercayaan sebagai pemimpin? Sikap terbaik jika memperoleh kepercayaan adalah mensyukurinya, sebab selain tidak banyak orang yang memperoleh kepercayaan seperti itu, juga pada hakikatnya merupakan nikmat dari Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah selalu ingat akan tugas kepemimpinan yang diembannya, yakni memimpin umat mencapai tujuan dengan ridha Tuhan. Apabila ia beriman dan bertakwa maka tugas-tugas kepemimpinannya itu akan disyukuri sebagai amanah dan sebagai kewajiban mulia agar mampu dilaksanakan dengan baik.

b. Bermoral

Dalam sejarah diceritakan bahwa Sultan Agung, Mataram berhasil menjadikan dirinya sebagai kerajaan yang mampu menaklukkan

kesombongan Kompeni. Hampir seluruh tanah Jawa dapat disatukan. Kekuasaannya menjangkau ke Sumatra, yakni Palembang dan Jambi, serta ke Kalimantan, yakni Banjarmasin. Namun, setelah Sultan Agung wafat, wibawa Mataram mulai melorot. Tahun 1645 Sultan Agung meninggal dunia dan dimakamkan di Imogiri, dekat Yogyakarta. Tahun itu juga, putranya, Pangeran Aria Prabu Adi Mataram, dinobatkan menjadi raja dengan gelar Sultan Amangkurat I.

Berbeda dari sifat ayahnya, Amangkurat I lebih suka hidup berfoya-foya. Kesempatan sebagai penguasa dimanfaatkan untuk meneguk kemewahan dan kesenangan. Kompeni Belanda yang dahulu dibenci ayahandanya, malah dirangkulnya. Kompeni Belanda dengan kekuatan dan kekayaannya telah memberikan berbagai keindahan dunia berupa minuman keras dan benda-benda perhiasan yang memabukkan.

Untuk mengamankan kekuasaannya, Amangkurat I menjalin perjanjian dengan Kompeni. Supaya aman ia harus membungkam orang atau para tokoh yang dianggapnya berbahaya. Adik kandungnya, Pangeran Alit, dibinasakannya. Iparnya, bupati Madura, Cakraningrat I, juga mengalami nasib yang sama. Yang lebih mengerikan adalah tindakannya sesudah selirnya yang tercantik, RatuMalang, meninggal secara mendadak. Ia menuduh, kematian itu akibat diracun oleh salah seorang atau beberapa selir saingannya. Maka sebanyak 43 orang selir yang berusia masih muda-muda dibinasakan hanya dalam waktu sehari saja. Dan, atas tuduhan yang tidak berdasar, segenap keluarga Pangeran Pekik, nenek Adipati Anom, anaknya, juga dibinasakan sampai tidak tersisa.

Tentu saja keresahan mulai merebak. Ketidakpuasan berkembang subur. Suara- suara ketidakdilan makin bermunculan. Menurut para penasihat raja, suasana seperti itu akan berbahaya jika dibiarkan merebak. Maka harus dicari penyelesaiannya yang cepat dan tuntas. Dibisikkan kepada Amangkurat I, para ulamalah yang bertanggung jawab atas semua ketidaktenangan itu. Merekalah yang paling gigih meneriakkan tuntutan kebenaran dan kejujuran. Jadi, para ulama yang dinilai sangat keras hati perlu dibinasakan.

Terjadilah kemudian malapetaka itu. Sebanyak 6.000 orang ulama tidak berdosa dikumpulkan di lapangan, dan dibantai hanya dalam tempo satu jam. Dengan demikian, Amangkurat I merasa bebas merdeka untuk berjabat tangan dan berpelukan mesra dengan Kompeni Belanda. Tidak ada lagi yang berani menegur atau menasihatinya.

Namun, tidak semua bangsawan menyetujui tindakan sewenang-wenang itu. Masih banyak kaum ningrat yang menyatu dengan rakyat. Tekad pun menyatu. Tekad rakyat, tekad para menak, tekad para penegak keadilan, semua menyatu, menjadi semangat perlawanan terhadap kezaliman dan kesewenang-wenangan.

Bangkitlah seorang pemuda dari lingkungan istana Cakraningrat I. Ia bernama Trunojoyo, cucu Prabu Cakraningrat I dari Madura. Dengan semangat memperjuangkan kebenaran dan melawan kelaliman, Trunojoyo mengobarkan pemberontakan, dibantu oleh Karaeng Galesong dari Makasar. Trunojoyo beserta pasukannya berjaya memasuki Mataram. Amangkurat I melarikan diri menyusuri pantai Jawa, akhirnya meninggal dunia di Tegal Arum dalam keadaan nista dan sengsara. (Dikutip dari: 30 Kisah Teladan, 1991).

Dari kisah tersebut di atas apakah Anda berpendapat bahwa Amangkurat I merupakan seorang pemimpin yang baik ? Apakah memiliki kualitas moral yang baik? Bagaimana jika seorang pemimpin, kualitas moralnya buruk? Apa yang akan terjadi?

Mari kita perhatikan pengertian moral yang kita maksudkan. Moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Istilah lain untuk moral adalah akhlak, budi pekerti, susila. Bermoral berarti mempunyai pertimbangan baik buruk. Pemimpin yang bermoral berarti pemimpin yang berakhlak baik.

Bagi kita yang terpenting adalah mampu mengambil hikmah dari sejumlah kejadian yang menimpa para pemimpin yang lalim dan tidak bermoral itu. Sejarah mencatat semua pemimpin yang zalim dan tidak bermoral tidak mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sedang ia

sendiri di akhir hayatnya memperoleh kehinaan dan derita. Amangkurat I, misalnya meninggal di tempat pelarian dengan amat mengenaskan. Raja Louis XVI raja yang amat “tiran” dari Prancis, mati di- guoletin (pisau pemotong hewan) oleh massa, Adolf Hitler seorang diktator dari Jerman meninggal dengan cara meminum racun. Oleh karena itu, tidak ada guna dan manfaatnya sama sekali dari seorang pemimpin yang demikian itu. Jadilah pemimpin yang bermoral, berakhlak, dan berbudi pekerti luhur yang dapat memberi kemaslahatan bagi rakyat. Syarat lain bagi seorang pemimpin adalah berilmu, terampil, dan demokratis.

SOAL LATIHAN

1. Jika dilihat dari segi bahasa (etimologis), demokrasi berasal dari Bahasa Yunani Kuno yaKNI “*demos*” dan “*kratein*” yang kedua kata tersebut memiliki makna...
 - a. Rakyat dan pemerintahan
 - b. Pemerintahan dan rakyat
 - c. Pemerintahan dan negara
 - d. Negara dan pemerintahan

2. Menurut *Carlos Alberto*(1998), dalam demokrasi terdapat tiga tradisi pemikiran politik yang terdiri atas...
 - a. Classical Aristotelian, Medieval Theory, Contemporary doctrine
 - b. Classical theory, Medieval Aristoteles, Contemporary doctrine
 - c. Classical theory, Medieval doctrine, Contemporary doctrine
 - d. Classical Aristotelian, Medieval Theory, Contemporary Theory

3. Masyarakat Barat merupakan masyarakat yang memiliki sejarah panjang dalam pelaksanaan demokrasi. Sejarah tumbuhnya demokrasi terpenting yaitu terjadi di kota....
 - a. Roma
 - b. Athena
 - c. London

- d. Irak
4. 1. Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
 2. Demokrasi dengan kecerdasan
 3. Demokrasi dengan HAM
 4. Demokrasi dengan Berkeadilan
 Empat ciri demokrasi di atas merupakan ciri dari demokrasi
 - a. Liberal
 - b. Terpimpin
 - c. Parlementer
 - d. Pancasial
 5. Kelima anasir demokrasi asli Nusantara menurut HATTA adalah
 - a. Rapat, gotong-royong, mengadakan protes bersama, hak menyingkir dari kekuasaan raja, demokrasi social
 - b. Berkumpul, gotong-royong, mengadakan protes bersama, hak menyingkir dari kekuasaan raja, demokrasi social
 - c. Berkumpul, gotong-royong, mengadakan demo bersama, hak menyingkir dari kekuasaan raja, demokrasi social
 - d. Rapat, gotong-royong, individual, hak mengikuti titah raja, demokrasi social

Daftar Pustaka

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka
- Citizenship in a Global World. Roman and Littlefield Publisher.
- Dahl, RA. 1992. *On Democracy*. New Heaven: Yale University Press.
- Hatta, M. 1992. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Idayu Press
- Hornby, A.S. 1995. *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*. Oxford: Oxford University Press
- Latif, Y. 2011. *Negara Paripurna: Historis, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia
- Malaka, T. 2005. *Merdeka 100%*. Tangerang: Marjñ Kiri

- Madjid, N. 1992. *Islam: Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 2006. *Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta: UI Press
- Sanusi, Achmad. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan Menghadapi Perubahan dan Gejolak Sosial*. Bandung : CICODE
- Soekarno. 1965. *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi
- Torres, Carlos Alberto. 1998. *Democracy, Education, and Multiculturalism: Dilemmas of*
- Wertheim, WF. 1995. *Indonesian Society in Transition*. Te Hague: Van Hoeve